

Collaborative Governance dalam Pengelolaan Ruang Publik Perkotaan: Studi Kemitraan Pemerintah dan Swasta pada Taman Kiara Artha Kota Bandung

Hani Maghfiroh^{1*}, Samugyo Ibnu Redjo², Novie Indrawati Sagita³

^{1*23}Universitas Padjadjaran, Sumedang

Corresponding Author's e-mail : hani24005@mail.unpad.ac.id, samugyo@unpad.ac.id,
novie.indrawati.sagita@unpad.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2700 - 2717

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2769>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.2769>

Article History:

Received: 12-06-2026

Revised: 26-08-2026

Accepted: 26-08-2026

Abstract : Urban public spaces play a vital role in supporting community social activities; however, the limited fiscal capacity of local governments has prompted the involvement of non-governmental actors in their management. One example of this is the management of Kiara Artha Park in Bandung, which involves the Bandung City Government, PT Bandung Infra Investama (BII), and PT Megachandra Purabuana. This study aims to analyze the collaborative governance involved in managing Kiara Artha Park, identify the forms of partnership among the actors, and examine the impact on the functions of the urban public space. The research employs a qualitative descriptive approach, utilizing document study techniques and secondary data analysis derived from scientific journals, regulations, institutional reports, official publications, and various documents related to the area's management. The analysis is conducted using the Ansell and Gash collaborative governance model, which encompasses face-to-face dialogue, trust-building, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes. Research results indicate that the management of Kiara Artha Park is carried out through a collaborative model characterized by communication among stakeholders, enduring relationships based on trust, a commitment to long-term cooperation, and a shared understanding regarding the management of the area. This collaboration has yielded various outcomes, including the development of a multifunctional public space that integrates social, recreational, tourism, and economic functions. The findings demonstrate that collaborative governance not only supports the sustainable management of public spaces but also fosters the development of public spaces that integrate social, recreational, tourism, and economic functions within a single urban area.

Keywords : Collaborative Governance; Urban Public Space; Kiara Artha Park; PPP/KPBU; Bandung City

Abstrak : Ruang publik perkotaan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas sosial masyarakat, namun keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah mendorong keterlibatan aktor non-pemerintah dalam pengelolaannya. Salah satu bentuknya dapat dilihat pada pengelolaan Taman Kiara Artha Kota Bandung yang melibatkan Pemerintah Kota Bandung, PT Bandung Infra Investama (BII), dan PT Megachandra Purabuana. Penelitian ini bertujuan menganalisis kolaboratif tata kelola dalam pengelolaan Taman Kiara Artha, mengidentifikasi bentuk kemitraan antaraktor, serta menganalisis penerapannya terhadap fungsi ruang publik perkotaan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik studi dokumentasi dan analisis data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, regulasi, laporan kelembagaan, publikasi resmi, dan berbagai dokumen terkait pengelolaan kawasan. Analisis dilakukan menggunakan model Collaborative Governance Ansell dan Gash yang meliputi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil antara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Taman Kiara Artha dilaksanakan melalui pola kolaborasi yang ditandai dengan komunikasi antaraktor, hubungan kepercayaan yang berkelanjutan, komitmen kerja sama jangka panjang, serta kesepahaman mengenai pengelolaan kawasan. Kolaborasi tersebut menghasilkan berbagai capaian, antara lain berkembangnya kawasan ruang publik multifungsi yang mengintegrasikan fungsi sosial, rekreasi, wisata, dan ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif tidak hanya mendukung penghentian pengelolaan ruang publik, tetapi juga mendorong berkembangnya ruang publik yang mengintegrasikan fungsi sosial, rekreasi, wisata, dan ekonomi dalam satu kawasan perkotaan.

Kata Kunci : Collaborative Governance; Ruang Publik Perkotaan; Taman Kiara Artha; KPBU/KPBU; Kota Bandung.

PENDAHULUAN

Ruang publik perkotaan memiliki peran penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat urban, terutama sebagai sarana interaksi sosial, rekreasi, dan aktivitas komunal masyarakat. Keberadaan ruang publik seperti taman kota tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas sosial, tetapi juga menjadi bagian dari kebutuhan ekologis perkotaan melalui penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) yang berkontribusi terhadap kualitas lingkungan kota. Dalam konteks pembangunan perkotaan modern, ruang publik dipahami sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkaitan dengan aksesibilitas, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat urban (Ilmi et al., 2025). Karena itu, keberadaan ruang publik menjadi salah satu indikator penting dalam tata kelola perkotaan yang berkelanjutan.

Penyediaan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menetapkan proporsi minimal ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas wilayah kota (BPK RI, 2025). Namun demikian, berbagai kota besar di Indonesia masih menghadapi keterbatasan penyediaan ruang terbuka hijau akibat tingginya laju urbanisasi, kepadatan pembangunan, serta alih fungsi lahan perkotaan. Kota Bandung misalnya, hingga tahun 2025 baru memiliki sekitar 17% ruang terbuka hijau dari total kebutuhan ideal kota (DPKP3 Kota Bandung, 2026). Persoalan ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan cukup besar dalam memenuhi kebutuhan ruang publik di tengah tekanan pembangunan perkotaan yang terus meningkat.

Selain keterbatasan ruang terbuka hijau, pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal dalam pembangunan fasilitas publik perkotaan. Di sisi lain, kebutuhan pembangunan infrastruktur dan ruang publik terus meningkat seiring perkembangan wilayah perkotaan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, Bappenas mencatat bahwa kebutuhan investasi infrastruktur nasional mencapai Rp6.445 triliun. Akan tetapi, kemampuan pemerintah melalui APBN dan APBD hanya mampu memenuhi sekitar

Rp2.385 triliun atau 37% dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional. Sementara itu, sekitar 42% kebutuhan pembiayaan diharapkan berasal dari sektor swasta dan 21% dari BUMN/BUMD (Bappenas, 2024; BAPPENAS RI, 2020). Kesenjangan pembiayaan tersebut mendorong pemerintah untuk melibatkan sektor non-pemerintah melalui pola kerja sama yang lebih kolaboratif.

Keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan dan pengelolaan fasilitas publik kemudian berkembang melalui skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema tersebut memungkinkan adanya pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan pihak swasta dalam pembangunan maupun pengelolaan infrastruktur publik (Wicaksono & Karniawati, 2023). Dalam praktiknya, pemerintah tetap menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan, sedangkan pihak swasta berperan dalam pembiayaan, pengembangan fasilitas, dan pengelolaan operasional kawasan. Model kerja sama ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan fasilitas publik sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur daerah di tengah keterbatasan fiskal pemerintah (Oktorina et al., 2025).

Konsep *collaborative governance* berkembang sebagai pendekatan tata kelola yang melibatkan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan pengaturan tata kelola di mana lembaga pemerintah melibatkan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat formal, deliberatif, dan berorientasi pada *consensus* (Ansell & Gash, 2008). Pendekatan ini menempatkan pemerintah, sektor swasta, dan aktor lainnya sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab bersama dalam penyelesaian persoalan publik (Novita Suratman & Darumurti, 2021). Dalam konteks perkotaan, *collaborative governance* menjadi relevan karena pengelolaan ruang publik tidak lagi dapat dilakukan secara administratif oleh pemerintah semata, tetapi memerlukan keterlibatan berbagai aktor dengan sumber daya dan kepentingan yang berbeda.

Salah satu bentuk penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan ruang publik perkotaan dapat ditemukan pada pengelolaan Taman Kiara Artha di Kota Bandung. Kawasan taman tersebut dikelola melalui kerja sama antara Pemerintah Kota Bandung, PT Bandung Infra Investama (BII) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan PT Megachandra Purabuana sebagai pihak swasta (Bandung Infra Investama, 2022). Pemerintah daerah berperan dalam aspek regulasi dan pengawasan pengelolaan kawasan, sementara PT Bandung Infra Investama menjalankan fungsi pengelolaan kawasan atas nama pemerintah daerah (Bandung Infra Investama, 2022). Di sisi lain, pihak swasta terlibat dalam pengembangan fasilitas, pengelolaan operasional, dan aktivitas ekonomi kawasan taman. Pola pengelolaan ini memperlihatkan bahwa tata kelola ruang publik perkotaan berkembang melalui keterlibatan berbagai aktor lintas sektor.

Dalam perkembangannya, Taman Kiara Artha tidak hanya berfungsi sebagai ruang rekreasi masyarakat, tetapi juga berkembang menjadi kawasan dengan aktivitas ekonomi dan wisata perkotaan. Di dalam kawasan taman terdapat berbagai fasilitas komersial seperti tenant kuliner, penyewaan kendaraan listrik, area hiburan, serta penyelenggaraan *event* dan konser yang rutin menarik pengunjung. Berdasarkan informasi pengelolaan kawasan, pengunjung dikenakan tiket masuk sebesar Rp10.000, sementara fasilitas sepeda listrik disewakan dengan tarif Rp30.000 pada hari kerja dan Rp40.000 pada akhir pekan (Maghfiroh & Kartini, 2024). Kehadiran berbagai aktivitas ekonomi di kawasan taman memperlihatkan adanya integrasi antara fungsi sosial dan fungsi ekonomi ruang publik.

Penelitian ini berlandaskan pada teori *collaborative governance*, konsep pengelolaan ruang publik, dan Public Private Partnership (PPP/KPBU). *Collaborative governance* dipahami sebagai pendekatan tata kelola yang melibatkan pemerintah dan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan secara kolaboratif untuk menyelesaikan persoalan publik yang kompleks (Ahad & Barsei, 2023; Noor et al., 2022). Menurut Ansell dan Gash (2008), keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa aspek penting, yaitu *face-to-face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes*. Melalui indikator tersebut, kolaborasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil kebijakan, tetapi juga pada kualitas hubungan, komunikasi, dan komitmen antaraktor yang terlibat (Ansell & Gash, 2008; Fitri et al., 2021).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep pengelolaan ruang publik sebagai kerangka untuk memahami fungsi sosial, ekologis, dan ekonomi ruang publik perkotaan. Ruang publik merupakan ruang yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan berperan sebagai sarana interaksi sosial serta peningkatan kualitas hidup masyarakat kota (Carr et al., 1992). Dalam perkembangan tata kelola perkotaan modern, pengelolaan ruang publik tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi melibatkan berbagai aktor non-pemerintah melalui mekanisme kolaboratif (Novita Suratman & Darumurti, 2021). Di sisi lain, berkembangnya aktivitas ekonomi di ruang publik dapat meningkatkan kualitas fasilitas dan keberlanjutan pengelolaan kawasan, namun juga berpotensi memengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap ruang publik (Gehl, 2013; Sushanti et al., 2021; Bahri & Relanda, 2024).

Untuk menjelaskan bentuk kemitraan yang terjadi dalam pengelolaan ruang publik, penelitian ini juga mengacu pada konsep Public Private Partnership (PPP/KPBU). PPP/KPBU merupakan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur maupun pelayanan publik, di mana pemerintah berperan sebagai regulator dan pengawas, sedangkan pihak swasta berkontribusi dalam pembiayaan, pembangunan, dan pengelolaan operasional (Asian Development Bank, 2020; BPK RI, 2015). Meskipun skema ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan fasilitas publik, implementasinya tetap menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pelayanan publik dan orientasi ekonomi pihak swasta (Collins, 2025; Yunusova, 2022). Oleh karena itu, ketiga konsep tersebut digunakan sebagai landasan analitis untuk memahami dinamika pengelolaan Taman Kiara Artha yang melibatkan pemerintah, BUMD, dan sektor swasta dalam satu sistem tata kelola kolaboratif.

Di satu sisi, pengelolaan kolaboratif dinilai mampu meningkatkan kualitas fasilitas publik, menjaga keberlanjutan operasional kawasan, serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sekitar taman (Wardani & Mutia, 2022). Namun di sisi lain, berkembangnya aktivitas komersial di ruang publik juga memunculkan persoalan mengenai aksesibilitas dan inklusivitas ruang publik bagi masyarakat. Kehadiran tarif masuk, aktivitas komersial, dan event berbayar membuat ruang publik tidak lagi sepenuhnya dikelola berdasarkan prinsip akses terbuka bagi seluruh masyarakat. Situasi ini memperlihatkan adanya perubahan orientasi ruang publik yang mengintegrasikan fungsi sosial dan fungsi ekonomi secara bersamaan (Maghfiroh & Kartini, 2024).

Penelitian mengenai *collaborative governance* telah banyak dilakukan dalam konteks pelayanan publik, lingkungan hidup, dan pengelolaan fasilitas publik daerah. Fitriyani., dkk (2021) dalam penelitiannya mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau publik di Kota Magelang menjelaskan bahwa *collaborative governance* menjadi pendekatan penting dalam membangun kerja sama antara pemerintah dan aktor non-pemerintah dalam pengelolaan fasilitas publik. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa dialog, koordinasi, dan komitmen antaraktor menjadi faktor penting dalam keberhasilan tata kelola kolaboratif (Fitriyani et al., 2021). Selain itu,

Wicaksono dan Karniawati (2023) menjelaskan bahwa skema Public Private Partnership (PPP) menjadi alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah. Penelitian tersebut menekankan bahwa keterlibatan sektor swasta mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan fasilitas publik melalui pembagian risiko dan sumber daya antara pemerintah dan pihak swasta (Wicaksono & Karniawati, 2023).

Kajian mengenai ruang publik perkotaan juga telah dilakukan oleh Hapsari (2023) yang menjelaskan bahwa taman kota memiliki fungsi penting sebagai ruang interaksi sosial, rekreasi, dan aktivitas masyarakat urban (Hapsari et al., 2023). Sementara itu, Oktorina (2025) menjelaskan bahwa keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan fasilitas publik mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi dan komersialisasi ruang publik perkotaan. Penelitian itu menjelaskan bahwa penerapan tarif, aktivitas komersial, dan event berbayar dapat memengaruhi pola akses masyarakat terhadap ruang publik (Oktorina et al., 2025).

Walaupun berbagai penelitian mengenai collaborative governance dan ruang publik telah dilakukan, sebagian besar masih berfokus pada pelayanan publik, lingkungan hidup, dan pembiayaan infrastruktur secara umum. Kajian mengenai collaborative governance dalam pengelolaan ruang publik perkotaan yang mengalami integrasi fungsi sosial dan fungsi ekonomi masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terkait PPP/KPBU lebih banyak menyoroiti aspek pembangunan infrastruktur dan efektivitas pembiayaan, sedangkan pembahasan mengenai implikasi collaborative governance terhadap perubahan orientasi ruang publik menjadi ruang semi-komersial belum banyak dilakukan. Atas dasar itu, penelitian ini berupaya menganalisis collaborative governance dalam pengelolaan Taman Kiara Artha Kota Bandung sebagai bentuk tata kelola ruang publik perkotaan yang melibatkan pemerintah daerah, BUMD, dan sektor swasta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *collaborative governance* dalam pengelolaan Taman Kiara Artha Kota Bandung, mengidentifikasi bentuk kemitraan antara pemerintah daerah, BUMD, dan sektor swasta, serta menganalisis implikasi pengelolaan kolaboratif terhadap fungsi sosial dan ekonomi ruang publik perkotaan. Fokus penelitian diarahkan pada hubungan antaraktor dalam pengelolaan kawasan taman serta pembagian peran yang dijalankan masing-masing lembaga. Penelitian juga menelaah dinamika pengelolaan ruang publik yang mempertemukan kepentingan pelayanan publik dan aktivitas ekonomi dalam satu kawasan.

Selain itu, penelitian ini juga berupaya melihat bagaimana keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan ruang publik memengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap ruang publik perkotaan. Pembahasan tersebut menjadi penting karena pengelolaan ruang publik melalui pola *collaborative governance* tidak hanya berkaitan dengan efektivitas pengelolaan kawasan, tetapi juga berkaitan dengan perubahan orientasi ruang publik dari fungsi sosial menuju fungsi semi-komersial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu pemerintahan, khususnya dalam pembahasan *collaborative governance*, tata kelola ruang publik perkotaan, serta dinamika hubungan antara kepentingan publik dan kepentingan ekonomi dalam pengelolaan fasilitas publik daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif untuk memahami *collaborative governance* dalam pengelolaan ruang publik secara kontekstual (Bryman & Bell, 2019). Penelitian dilakukan di Taman Kiara Artha Kota Bandung yang dikelola melalui kerja sama antara Pemerintah Kota Bandung, PT Bandung Infra Investama (BII) sebagai BUMD, dan pihak swasta. Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, regulasi pemerintah, laporan kelembagaan, website

resmi, publikasi media online, dan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Taman Kiara Artha serta *collaborative governance*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur, sedangkan validitas data diperkuat menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen dan referensi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Miles et al., 2018). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *content analysis* untuk mengidentifikasi pola *collaborative governance*, pembagian peran antaraktor, dan dinamika komersialisasi ruang publik dalam pengelolaan Taman Kiara Artha Kota Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Taman Kiara Artha sebagai Ruang Publik Perkotaan

Taman Kiara Artha merupakan salah satu ruang publik perkotaan yang berlokasi di Jalan Banten, Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung. Kawasan ini mulai dioperasikan pada tahun 2019 sebagai bagian dari pengembangan ruang terbuka publik dan kawasan wisata perkotaan di Kota Bandung (Bandung Infra Investama, 2022). Pengelolaan kawasan melibatkan pemerintah daerah, BUMD, dan sektor swasta yang memiliki peran berbeda dalam penyelenggaraan dan pengembangan kawasan. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menjadi karakteristik penting dalam tata kelola Taman Kiara Artha dan menjadi dasar bagi terbentuknya mekanisme pengelolaan kolaboratif yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

Gambar 1. Potret Taman Kiara Artha (*Kiara Artha Park*) Kota Bandung



Sumber: diambil langsung oleh penulis

Dalam struktur pengelolaan kawasan, Pemerintah Kota Bandung bertindak sebagai pemilik aset dan pemegang kewenangan kebijakan, sedangkan PT Bandung Infra Investama (BII) menjalankan fungsi pengelolaan kawasan atas nama pemerintah daerah. Operasional dan pengembangan fasilitas kawasan didukung oleh PT Megachandra Purabuana sebagai mitra swasta melalui skema kerja sama yang telah disepakati (Bandung Infra Investama, 2022; Pemerintah Kota Bandung, 2017). Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ruang publik dilakukan melalui pola kerja sama lintas sektor.

Kerja sama pengelolaan Taman Kiara Artha dilaksanakan melalui skema kerja sama operasional jangka panjang antara BUMD dan pihak swasta (Bahri & Relanda, 2024). Skema tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan fasilitas publik. Selain itu, kerja sama juga dilakukan untuk

meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan melalui dukungan investasi dan manajemen operasional dari sektor swasta (Wardani & Mutia, 2022). Dalam konteks ini, pemerintah daerah tetap menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan terhadap pengelolaan taman. Oleh sebab itu, pola kerja sama yang diterapkan menunjukkan adanya kombinasi antara fungsi pelayanan publik dan pengelolaan berbasis bisnis.

Tabel 2. Profil Kawasan Taman Kiara Artha Kota Bandung

Aspek	Keterangan
Nama Kawasan	Taman Kiara Artha/ <i>Kiara Artha Park</i>
Lokasi	Jl. Banten, Kebonwaru, Batununggal, Kota Bandung.
Luas Kawasan Taman Kiara Artha	$\pm 12,9$ hektare
Luas Taman Kiara Artha	$\pm 2,9$ hektare
Tahun Operasional	2019
Pengelola	PT Bandung Infra Investama
Mitra Swasta	PT Megachandra Purabuana

Sumber: (Bandung Infra Investama, 2022; Pemerintah Kota Bandung, 2017)

Kawasan Taman Kiara Artha berkembang menjadi salah satu ruang publik yang memiliki tingkat aktivitas cukup tinggi. Selain dimanfaatkan sebagai ruang rekreasi harian, kawasan ini juga menjadi lokasi berbagai kegiatan komunitas, aktivitas olahraga, festival kuliner, bazar UMKM, dan kegiatan hiburan lainnya. Penelitian Rahmasari dan Suryani (2023) menunjukkan bahwa pengunjung melakukan rata-rata delapan jenis aktivitas dalam satu periode observasi, mulai dari berjalan kaki, berolahraga, bersantai, berfoto, hingga melakukan aktivitas kuliner (Rahmasari & Suryani, 2023). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kawasan dimanfaatkan secara intensif oleh masyarakat dengan beragam kebutuhan dan tujuan penggunaan ruang.

Tingginya variasi aktivitas tersebut memengaruhi pola pemanfaatan ruang di dalam kawasan. Pengelola tidak hanya menyediakan fasilitas publik untuk kegiatan rekreasi, tetapi juga mengakomodasi berbagai aktivitas ekonomi dan sosial yang berkembang di dalam taman. Situasi ini menunjukkan bahwa Taman Kiara Artha tidak lagi berfungsi sebagai taman kota konvensional, melainkan berkembang sebagai ruang publik yang menampung berbagai bentuk aktivitas perkotaan dalam satu kawasan yang sama.

Tabel 3. Bentuk Pemanfaatan Ruang di Taman Kiara Artha

Fungsi Ruang	Bentuk Pemanfaatan
Rekreasi	<i>Jogging track</i> , area bermain, ruang terbuka
Sosial	Kegiatan komunitas dan interaksi masyarakat

Wisata	Dancing Fountain dan atraksi kawasan
Ekonomi	Tenant kuliner dan UMKM
Event	Festival, bazar, dan kegiatan publik

Sumber: Diolah penulis berdasarkan observasi dokumen dan publikasi kawasan (2025).

Keragaman fungsi dan aktivitas yang berkembang di kawasan menunjukkan bahwa pengelolaan Taman Kiara Artha tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas publik, tetapi juga mencakup koordinasi berbagai kepentingan yang terlibat di dalamnya. Situasi tersebut menjadikan pendekatan *collaborative governance* relevan untuk memahami bagaimana pengelolaan kawasan dijalankan oleh berbagai aktor yang memiliki sumber daya dan kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, analisis terhadap proses kolaborasi antaraktor menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan kawasan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan mampu mengakomodasi berbagai fungsi yang berkembang di dalamnya.

***Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Taman Kiara Artha**

Pengelolaan Taman Kiara Artha memperlihatkan perubahan pola tata kelola ruang publik yang tidak lagi sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah daerah. Keterlibatan PT Bandung Infra Investama (BII) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan PT Megachandra Purabuana sebagai mitra swasta menunjukkan adanya pembagian peran dalam pengelolaan kawasan. Model pengelolaan tersebut berkembang seiring meningkatnya kebutuhan pemeliharaan fasilitas publik, penyelenggaraan aktivitas kawasan, serta pengembangan berbagai fungsi ekonomi yang berada di dalam ruang publik (Yunusova, 2022). Dalam praktiknya, setiap aktor memiliki sumber daya yang berbeda sehingga pengelolaan kawasan dilakukan melalui mekanisme kolaboratif yang memungkinkan terjadinya pertukaran kewenangan, sumber daya, dan kapasitas pengelolaan (Setiajatnika et al., 2023).

Tabel 4. Kontribusi Sumber Daya Antaraktor dalam Pengelolaan Taman Kiara Artha

Aktor	Kontribusi Utama	Bentuk Sumber Daya
Pemerintah Kota Bandung	Regulasi dan pengawasan	Kewenangan dan aset publik
PT Bandung Infra Investama	Pengelolaan kawasan	Manajemen dan koordinasi
PT Megachandra Purabuana	Operasional kawasan	Investasi dan operasional
Tenant/UMKM	Aktivitas ekonomi	Perdagangan dan jasa
Masyarakat	Pemanfaatan ruang publik	Partisipasi penggunaan kawasan

Sumber: (Bandung Infra Investama, 2022; A. A. D. Fajar et al., 2025; Maghfiroh & Kartini, 2024)

Pembagian sumber daya tersebut memperlihatkan bahwa tidak terdapat satu aktor yang mampu menjalankan seluruh fungsi pengelolaan kawasan secara mandiri. Pemerintah daerah memiliki legitimasi dan kewenangan dalam pengelolaan aset publik, namun keterbatasan sumber daya operasional membuat pengelolaan kawasan membutuhkan dukungan dari aktor lain. Di sisi

lain, pihak swasta memiliki kemampuan operasional dan pengalaman pengelolaan kawasan yang dapat mendukung keberlanjutan aktivitas taman. Posisi BII menjadi penting karena berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah daerah dan pihak swasta dalam menjalankan pengelolaan kawasan.

1. *Face-to-Face Dialogue*

Dialog menjadi elemen penting dalam *collaborative governance* karena menjadi ruang bagi aktor yang memiliki kepentingan berbeda untuk membangun komunikasi dan menyusun kesepahaman bersama (Arofah, 2022). Dalam pengelolaan Taman Kiara Artha, komunikasi tidak hanya berlangsung pada tahap perencanaan, tetapi juga pada pelaksanaan berbagai aktivitas yang berlangsung di kawasan taman. Pengembangan fasilitas, penyelenggaraan kegiatan publik, aktivitas ekonomi kawasan, serta pengelolaan tenant memerlukan koordinasi yang melibatkan berbagai pihak.

Tabel 5. Aktivitas Kolaboratif di Taman Kiara Artha

Bentuk Kegiatan	Aktor yang Terlibat
Festival UMKM	BII, UMKM, Mitra Swasta
Festival Kuliner	BII, Tenant, Mitra Swasta
Kegiatan Komunitas	BII dan Komunitas
Event Hiburan	Pengelola dan Mitra Swasta
Aktivasi Kawasan	Seluruh Aktor

Sumber: (Bandung Infra Investama, 2022; Kaban et al., 2025)

Berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antaraktor tidak bersifat insidental, melainkan berlangsung secara berkelanjutan mengikuti kebutuhan pengelolaan kawasan. Dalam konteks *collaborative governance*, komunikasi menjadi mekanisme yang memungkinkan setiap aktor menyampaikan kepentingannya tanpa mengabaikan fungsi utama taman sebagai ruang publik. Peran BII terlihat cukup dominan karena berada pada posisi yang menjembatani kebutuhan pemerintah daerah dengan kepentingan operasional yang dijalankan pihak swasta.

Dialog yang berlangsung juga berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan ruang publik yang digunakan untuk berbagai kepentingan. Kawasan Taman Kiara Artha tidak hanya digunakan sebagai ruang rekreasi masyarakat, tetapi juga menjadi lokasi penyelenggaraan festival, bazar UMKM, kegiatan komunitas, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Kompleksitas fungsi kawasan tersebut membuat komunikasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari proses pengelolaan taman.

2. *Trust Building*

Kepercayaan menjadi fondasi penting dalam kolaborasi karena setiap aktor harus memiliki keyakinan bahwa pihak lain mampu menjalankan tanggung jawab yang diberikan (Kurniawan et al., 2022). Dalam pengelolaan Taman Kiara Artha, aspek kepercayaan dapat dilihat dari pemberian mandat pengelolaan kawasan oleh Pemerintah Kota Bandung kepada PT Bandung Infra Investama sebagai pengelola kawasan atas nama pemerintah daerah. Hubungan tersebut menunjukkan

adanya keyakinan pemerintah terhadap kapasitas BII dalam mengelola aset publik yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi secara bersamaan.

Kepercayaan antaraktor tidak terbentuk secara instan, melainkan berkembang melalui hubungan kerja sama yang berlangsung dalam jangka panjang. Dalam kasus Taman Kiara Artha, kepercayaan tersebut tercermin dari keberlanjutan kemitraan antara Pemerintah Kota Bandung, PT Bandung Infra Investama, dan PT Megachandra Purabuana yang tetap berjalan sejak dimulainya kerja sama pada tahun 2018. Keberlangsungan kolaborasi selama lebih dari enam tahun menunjukkan bahwa masing-masing pihak dinilai mampu menjalankan peran dan tanggung jawab yang telah disepakati. Dalam perspektif Ansell dan Gash (2008), pengalaman kerja sama yang berjalan secara konsisten menjadi salah satu faktor yang memperkuat *trust building* karena aktor memperoleh keyakinan terhadap kapasitas dan komitmen pihak lain melalui interaksi yang berulang.

Selain tercermin dari keberlanjutan hubungan kerja sama, kepercayaan antaraktor juga terlihat dari pembagian kewenangan yang relatif jelas dalam pengelolaan kawasan. Pemerintah daerah memberikan ruang kepada BII untuk menjalankan fungsi pengelolaan kawasan, sementara pihak swasta memperoleh peran dalam pengembangan dan operasional kawasan sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan. Keberlangsungan kerja sama selama lebih dari enam tahun menunjukkan bahwa hubungan antaraktor tidak hanya bertumpu pada kontrak formal, tetapi juga pada keyakinan bahwa masing-masing pihak mampu menjalankan tanggung jawabnya sesuai kesepakatan. Keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan dan operasional kawasan juga memperlihatkan adanya tingkat kepercayaan yang memungkinkan pembagian tanggung jawab dilakukan secara lebih fleksibel. Hubungan tersebut memungkinkan pengelolaan kawasan berjalan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada mekanisme birokrasi yang bersifat hierarkis (Arofah, 2022).

Tabel 6. Indikator *Trust Building* dalam Pengelolaan Taman Kiara Artha

Indikator Kepercayaan	Bukti Empiris
Mandat pengelolaan	Pemkot menunjuk BII sebagai pengelola kawasan
Kerja sama jangka panjang	KSO sejak 2018
Keberlanjutan kolaborasi	Masih berlangsung hingga saat ini
Pengembangan kawasan	Aktivitas dan fasilitas terus bertambah

Sumber: Diolah penulis (2025).

3. *Commitment to Process*

Komitmen terhadap proses kolaborasi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan kerja sama antaraktor. Pada pengelolaan Taman Kiara Artha, komitmen tersebut dapat dilihat dari bentuk kerja sama yang tidak dirancang untuk kebutuhan jangka pendek. Berdasarkan dokumen PT Bandung Infra Investama, pengembangan Kawasan Kiara Artha Park dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Megachandra Purabuana yang memiliki masa kerja sama selama 30 tahun sejak tahun 2018 (AG Network, 2022). Jangka waktu tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi yang dibangun diarahkan untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan kawasan dalam jangka panjang, bukan hanya untuk pembangunan fisik semata.

Tabel 7. Indikator Komitmen Kolaborasi Pengelolaan Taman Kiara Artha

Indikator	Temuan Empiris
Bentuk kerja sama	Kerja Sama Operasi (KSO)
Mitra kerja sama	PT Megachandra Purabuana
Tahun dimulai	2018
Masa kerja sama	30 tahun
Sistem kerja sama	Bagi hasil pendapatan

Sumber: PT Bandung Infra Investama (2024).

Komitmen tersebut tidak hanya tercermin dalam durasi kerja sama, tetapi juga pada keberlanjutan aktivitas kawasan sejak taman mulai beroperasi pada tahun 2019. Berbagai fasilitas, kegiatan publik, dan aktivitas ekonomi yang berkembang di kawasan menunjukkan bahwa para aktor yang terlibat terus menjalankan perannya sesuai kesepakatan yang telah dibangun. Dalam konteks *collaborative governance*, keberlanjutan hubungan kerja sama menjadi indikator penting karena menunjukkan adanya kesediaan setiap aktor untuk mempertahankan kolaborasi meskipun memiliki kepentingan yang berbeda (Ariesmansyah et al., 2023).

Fakta bahwa kawasan masih terus dikembangkan hingga saat ini memperlihatkan bahwa kolaborasi tidak berhenti pada tahap pembangunan awal. Pengembangan berbagai fasilitas baru, aktivitas komersial, dan penyelenggaraan event publik menunjukkan bahwa kerja sama antaraktor terus berlangsung mengikuti kebutuhan kawasan. Situasi ini sejalan dengan pandangan Ansell dan Gash (2008) yang menempatkan komitmen sebagai elemen penting dalam menjaga keberlangsungan *collaborative governance*.

4. *Shared Understanding*

Masing-masing aktor yang terlibat dalam pengelolaan Taman Kiara Artha memiliki kepentingan yang berbeda. Pemerintah Kota Bandung berkepentingan menjaga fungsi publik kawasan dan optimalisasi aset daerah, PT Bandung Infra Investama berkepentingan memastikan efektivitas pengelolaan kawasan, sedangkan pihak swasta berkepentingan terhadap keberlanjutan operasional dan aktivitas ekonomi yang berkembang di kawasan (Pratama, 2023). Meskipun demikian, perbedaan kepentingan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang menghambat pengelolaan kawasan. Sebaliknya, para aktor berhasil membangun kesepahaman mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan taman melalui kombinasi fungsi sosial dan fungsi ekonomi yang saling mendukung.

Tabel 8. Kepentingan Aktor dalam Pengelolaan Taman Kiara Artha

Aktor	Kepentingan Utama
Pemerintah Kota Bandung	Pelayanan publik dan optimalisasi aset daerah
PT Bandung Infra Investama	Efektivitas pengelolaan kawasan
PT Megachandra Purabuana	Keberlanjutan operasional dan pengembangan usaha

Tenant/UMKM	Kesempatan usaha
Masyarakat	Akses terhadap ruang publik

Sumber: Diolah penulis (2025).

Perbedaan kepentingan tersebut tidak selalu menjadi hambatan dalam proses kolaborasi. Sebaliknya, setiap aktor memiliki ketergantungan terhadap sumber daya yang dimiliki pihak lain. Pemerintah membutuhkan dukungan operasional dan investasi untuk menjaga keberlangsungan kawasan, sementara pihak swasta membutuhkan legitimasi dan kepastian pengelolaan dari pemerintah daerah (Wicaksono & Karniawati, 2023). Hubungan saling ketergantungan tersebut menciptakan ruang bagi terbentuknya kesepahaman bersama mengenai arah pengelolaan kawasan.

Kesepahaman yang terbentuk bukan berarti seluruh aktor memiliki tujuan yang identik, melainkan adanya kesepakatan mengenai arah pengelolaan kawasan yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan. Pemerintah memperoleh manfaat berupa terjaganya fungsi ruang publik, BUMD memperoleh ruang untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, sementara pihak swasta memperoleh kepastian dalam menjalankan aktivitas operasional dan bisnis. Titik temu kepentingan tersebut menjadi dasar yang memungkinkan kolaborasi tetap berjalan dan berkembang hingga saat ini.

5. *Intermediate Outcomes*

Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa keberhasilan awal menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan *collaborative governance*. Pada kasus Taman Kiara Artha, hasil awal kolaborasi dapat dilihat dari terbentuknya kawasan publik yang mampu mengintegrasikan fungsi sosial, rekreasi, wisata, dan ekonomi dalam satu ruang perkotaan. Kawasan yang sebelumnya merupakan lahan pengembangan kemudian berkembang menjadi salah satu destinasi ruang publik yang aktif digunakan masyarakat Kota Bandung.

Tabel 9. Indikator Hasil Awal *Collaborative Governance* Taman Kiara Artha

Indikator	Data Empiris
Masa kerja sama	30 tahun sejak 2018
Luas kawasan	±12,9 hektare
Luas ruang terbuka hijau	±2,6 hektare
Kunjungan akhir pekan	±3.500 pengunjung
Potensi kunjungan bulanan	±75.000 pengunjung
Pengembangan kawasan bisnis	77 unit ruko tahap awal

Sumber: (AG Network, 2022; Bandung Infra Investama, 2022; A. Fajar et al., 2025)

Data pada Tabel 9 menunjukkan bahwa *collaborative governance* tidak hanya menghasilkan mekanisme kerja sama antaraktor, tetapi juga menghasilkan capaian yang dapat diamati secara konkret. Keberadaan kawasan seluas 12,9 hektare, ruang terbuka hijau sekitar 2,6 hektare, tingginya tingkat kunjungan masyarakat, serta berkembangnya area bisnis menunjukkan

bahwa kolaborasi mampu menghasilkan manfaat yang dirasakan oleh berbagai pihak. Dalam perspektif Ansell dan Gash (2008), capaian-capaian awal tersebut berfungsi sebagai intermediate outcomes yang memperkuat legitimasi kolaborasi dan mendorong keberlanjutan kerja sama pada tahap berikutnya. Capaian ini juga penting karena memberikan insentif bagi para aktor untuk mempertahankan kolaborasi yang telah dibangun. Semakin besar manfaat yang dihasilkan, semakin kuat pula alasan bagi setiap aktor untuk tetap terlibat dalam pengelolaan kawasan.

Hasil kolaborasi dalam pengelolaan Taman Kiara Artha tidak hanya terlihat pada keberadaan kawasan sebagai ruang publik, tetapi juga pada kemampuan kawasan mempertahankan aktivitas sosial dan ekonomi secara bersamaan. Kawasan yang dikembangkan melalui kerja sama jangka panjang selama 30 tahun tersebut saat ini mencakup area seluas sekitar 12,9 hektare dengan ruang terbuka hijau sekitar 2,6 hektare yang dapat diakses masyarakat. Keberadaan ruang terbuka hijau dalam skala tersebut menjadi penting di tengah keterbatasan ruang publik perkotaan yang dihadapi Kota Bandung.

Aktivitas masyarakat yang berlangsung di kawasan juga menunjukkan tingkat pemanfaatan ruang yang relatif tinggi. Ragam aktivitas yang dilakukan menunjukkan bahwa kawasan tidak dimanfaatkan untuk satu fungsi tertentu, melainkan berkembang sebagai ruang publik multifungsi yang mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat. Dari sisi ekonomi, pengembangan kawasan terus berlanjut melalui pembangunan area bisnis dan komersial. Pada tahap awal pengembangan business center, direncanakan pembangunan 77 unit ruko yang menjadi bagian dari ekosistem kawasan (Rahmasari & Suryani, 2023). Kehadiran area komersial tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan Taman Kiara Artha tidak hanya diarahkan pada penyediaan ruang publik, tetapi juga pada penciptaan aktivitas ekonomi yang mendukung keberlanjutan kawasan.

Tingginya intensitas pemanfaatan kawasan juga terlihat dari jumlah kunjungan masyarakat. Data pengelola menunjukkan bahwa kunjungan akhir pekan dapat mencapai sekitar 3.500 orang, sementara kawasan bisnis yang terintegrasi dengan taman mencatat potensi kunjungan hingga sekitar 75.000 orang per bulan (A. Fajar et al., 2025). Tingkat kunjungan tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi yang dibangun tidak hanya menghasilkan fasilitas fisik, tetapi juga mampu menciptakan ruang publik yang aktif digunakan oleh masyarakat.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan Taman Kiara Artha menghasilkan dua konsekuensi sekaligus. Di satu sisi, kolaborasi berhasil meningkatkan kualitas pengelolaan dan keberlanjutan kawasan. Di sisi lain, semakin kuatnya aktivitas komersial menunjukkan bahwa ruang publik juga mengalami transformasi menjadi ruang yang memadukan fungsi sosial dan fungsi ekonomi dalam satu kawasan perkotaan (Yuana et al., 2025).

Implikasi Pengelolaan Kolaboratif terhadap Fungsi Ruang Publik

Kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung, PT Bandung Infra Investama (BII), dan PT Megachandra Purabuana tidak hanya memengaruhi pola pengelolaan kawasan, tetapi juga berpengaruh terhadap fungsi ruang publik yang berkembang di Taman Kiara Artha. Keterlibatan berbagai aktor memungkinkan kawasan dikelola secara lebih berkelanjutan melalui kombinasi sumber daya pemerintah, BUMD, dan sektor swasta. Kondisi tersebut terlihat dari berkembangnya fasilitas publik, meningkatnya aktivitas kawasan, serta munculnya berbagai kegiatan ekonomi yang terintegrasi dengan fungsi ruang publik (A. Fajar et al., 2025).

Salah satu implikasi yang terlihat adalah meningkatnya intensitas pemanfaatan kawasan oleh masyarakat. Data pengelola menunjukkan bahwa jumlah kunjungan pada akhir pekan dapat mencapai sekitar 3.500 pengunjung (A. Fajar et al., 2025). Tingginya tingkat kunjungan tersebut

menunjukkan bahwa kawasan berhasil berkembang menjadi salah satu ruang publik yang aktif digunakan masyarakat Kota Bandung. Tingkat aktivitas yang tinggi juga didukung oleh keberadaan berbagai fasilitas publik dan kegiatan yang diselenggarakan secara rutin di kawasan taman.

Tabel 10. Dampak *Collaborative Governance* terhadap Fungsi Ruang Publik

Aspek	Bukti Empiris
Sosial	Rata-rata 8 jenis aktivitas pengunjung
Ekonomi	Kehadiran tenant dan 77 unit ruko
Wisata	<i>Dancing Fountain</i> dan event kawasan
Pengelolaan	KSO 30 tahun
Kawasan	Kunjungan akhir pekan ± 3.500 orang

Sumber: Diolah penulis (2025).

Perkembangan aktivitas ekonomi menjadi implikasi lain yang cukup menonjol dalam pengelolaan Taman Kiara Artha. Kehadiran tenant kuliner, area komersial, penyelenggaraan festival, serta pengembangan kawasan bisnis menunjukkan bahwa ruang publik tidak lagi berfungsi semata sebagai ruang rekreasi masyarakat. Aktivitas ekonomi menjadi bagian yang semakin penting dalam mendukung operasional dan keberlanjutan kawasan. Skema kerja sama jangka panjang selama 30 tahun yang diterapkan antara BII dan mitra swasta juga memperlihatkan bahwa keberlanjutan pengelolaan kawasan sangat berkaitan dengan kemampuan kawasan menghasilkan nilai ekonomi.

Di sisi lain, berkembangnya fungsi ekonomi memunculkan perubahan orientasi dalam pemanfaatan ruang publik. Beberapa fasilitas dan aktivitas di kawasan mulai dioperasikan melalui mekanisme berbayar, sementara sebagian area kawasan dimanfaatkan untuk kegiatan komersial. Situasi tersebut menunjukkan bahwa batas antara ruang publik dan ruang ekonomi menjadi semakin cair. Ruang publik tidak lagi hanya diposisikan sebagai fasilitas sosial yang sepenuhnya dibiayai pemerintah, tetapi berkembang sebagai ruang yang dikelola melalui kombinasi kepentingan publik dan kepentingan ekonomi.

Tabel 11. Perubahan Fungsi Ruang Publik di Taman Kiara Artha

Fungsi Tradisional Ruang Publik	Fungsi yang Berkembang di Taman Kiara Artha
Rekreasi masyarakat	Rekreasi dan aktivitas ekonomi
Ruang interaksi sosial	Ruang sosial dan komersial
Ruang terbuka public	Ruang publik multifungsi
Fasilitas publik non-komersial	Fasilitas publik dengan dukungan aktivitas bisnis

Sumber: Diolah penulis (2025).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa *collaborative governance* menghasilkan konsekuensi yang bersifat ganda. Pada satu sisi, kolaborasi mampu meningkatkan kualitas

pengelolaan kawasan, memperluas aktivitas masyarakat, dan mengurangi beban pemerintah dalam pengelolaan ruang publik. Namun pada sisi lain, kolaborasi juga mendorong berkembangnya aktivitas komersial yang berpotensi mengubah orientasi ruang publik (Fitri et al., 2021). Dalam konteks Taman Kiara Artha, fungsi sosial dan fungsi ekonomi tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling berkelindan dalam satu kawasan yang sama.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa *collaborative governance* tidak hanya berpengaruh terhadap cara ruang publik dikelola, tetapi juga memengaruhi karakter ruang publik itu sendiri. Taman Kiara Artha berkembang sebagai ruang publik multifungsi yang memadukan fungsi rekreasi, interaksi sosial, aktivitas ekonomi, dan wisata perkotaan. Karakteristik tersebut menjadi temuan penting karena menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan ruang publik tidak selalu mengurangi fungsi publik kawasan, tetapi dapat menghasilkan bentuk ruang publik baru yang memiliki orientasi sosial dan ekonomi secara bersamaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan Taman Kiara Artha Kota Bandung dilaksanakan melalui pola *collaborative governance* yang melibatkan Pemerintah Kota Bandung, PT Bandung Infra Investama (BII), dan PT Megachandra Purabuana sebagai mitra swasta. Kolaborasi tersebut berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan pengelolaan ruang publik yang semakin kompleks dan memerlukan dukungan sumber daya dari berbagai aktor. Keterlibatan pemerintah, BUMD, dan sektor swasta menunjukkan bahwa pengelolaan ruang publik perkotaan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada mekanisme birokrasi pemerintah daerah.

Berdasarkan analisis menggunakan model *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008), proses kolaborasi dalam pengelolaan Taman Kiara Artha ditunjukkan melalui keberadaan komunikasi antaraktor, pembangunan kepercayaan, komitmen jangka panjang, kesepahaman tujuan, serta capaian awal yang mendukung keberlanjutan kerja sama. Komunikasi dan koordinasi dilakukan melalui berbagai aktivitas pengelolaan kawasan, penyelenggaraan kegiatan publik, serta pengembangan fasilitas yang melibatkan berbagai pihak. Kepercayaan antarpemangku kepentingan tercermin dari keberlangsungan kerja sama yang telah berjalan selama lebih dari enam tahun dan didukung oleh pembagian peran yang relatif jelas. Komitmen kolaborasi juga terlihat dari skema Kerja Sama Operasi (KSO) yang dirancang untuk jangka waktu tiga puluh tahun. Rangkaian proses tersebut memungkinkan setiap aktor menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara saling melengkapi dalam pengelolaan kawasan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kolaborasi yang dibangun menghasilkan berbagai manfaat bagi pengelolaan kawasan. Taman Kiara Artha berkembang menjadi ruang publik yang mampu mengintegrasikan fungsi rekreasi, sosial, wisata, dan ekonomi dalam satu kawasan perkotaan. Kehadiran berbagai fasilitas publik, aktivitas komunitas, tenant usaha, dan penyelenggaraan event memperlihatkan tingginya intensitas pemanfaatan ruang oleh masyarakat. Dari sisi tata kelola, keterlibatan sektor swasta turut mendukung keberlanjutan operasional kawasan melalui dukungan investasi dan pengelolaan fasilitas. Pada saat yang sama, pemerintah daerah tetap mempertahankan perannya dalam aspek regulasi dan pengawasan sehingga fungsi publik kawasan tetap dapat dijalankan.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa *collaborative governance* tidak hanya memengaruhi cara ruang publik dikelola, tetapi juga berkontribusi terhadap perubahan karakter ruang publik itu sendiri. Taman Kiara Artha berkembang sebagai ruang publik multifungsi yang mempertemukan kepentingan sosial dan ekonomi dalam satu sistem pengelolaan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan sektor swasta tidak selalu mengurangi fungsi publik kawasan

selama terdapat mekanisme koordinasi, pengawasan, dan pembagian peran yang jelas antaraktor. Pengalaman pengelolaan Taman Kiara Artha dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan model pengelolaan ruang publik yang kolaboratif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- AG Network. (2022). *Kiara Artha Park*. Artha Graha Network.
- Ahad, M. P. Y., & Barsei, A. N. (2023). Collaborative Governance Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Best Praticice Dari Pemerintah Daerah Di Indonesia Timur. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(1), 52–74.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ariesmansyah, A., R. Hari Busthomi Ariffin, & Luthfi Ardhia Respati. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal El-Riyasah*, 14(1), 7. <https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.7-12>
- Arif Kurniawan, I., Widianingsih, I., Ningrum Wiradinata, S., & Jaja Raharja, S. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kampung Wisata Dalam Mengatasi Persoalan Kumuh Di Kota Tangerang. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 2021(September), 105–113.
- Arofah, F. N. (2022). Collaborative Governance dalam Upaya Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Madiun. *Universitas Sebelas Maret*, 3, 217–235. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/85457/>
- Asian Development Bank. (2020). *Public Private Monitor Public Private Monitor Indonesia* (Number December). Asian Development Bank. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22617/SGP210069-2>
- Bahri, C. Y., & Relanda. (2024). Manfaat Pengembangan Pariwisata Kiara Artha Park Terhadap Kehidupan Masyarakat Sekitar. *Jurnal Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 2(3), 115–124. <https://doi.org/10.59581/jmpp-widyakarya.v2i3.3512>
- Bandung Infra Investama. (2022). *Detail Proyek*. Bandung Infra Investama. <https://www.bandunginfra.co.id/detail-proyek/proyek-kawasan-kiara-artha-park>
- Bappenas. (2024). *Pendanaan Alternatif - Buku Saku*. Direktorat Pembangunan Daerah
- BAPPENAS RI. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. In *National Mid-Term Development Plan 2020-2024*. Perpustakaan Bappenas
- BPK RI. (2015). *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2015 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41764/perpres-no-38-tahun-2015>
- BPK RI. (2025). *Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007 Penataan Ruang*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/details/39908/uu-no-26-tahun-2007>
- Bryman, A., & Bell, E. A. (2019). *Social Research Methods*. Oxford University Press. <https://books.google.co.id/books?id=fKxquwEACAAJ>
- Carr, S., Francis, M., Rivlin, L. G., & Stone, A. M. (1992). Public spaces. *Cambridge University Press*, 15(2), 1–23.
- Collins, J. S. (2025). Optimalisasi Skema Public-Private Partnership Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Suara Keadilan*, 26(1), 35–52. <https://doi.org/10.24176/sk.v26i1.14757>

- DPKP3 Kota Bandung. (2026). *Ada apa dengan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung?* Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Bandung. <https://www.rth.bandung.go.id/>
- Fajar, A. A. D., Gilang Pratama Putra, & Neni Rohaeni. (2025). Pengaruh Fasilitas Terhadap Kepuasan Pengunjung di Kiara Artha Park Bandung. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 7, 129–141. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v7i1.5024>
- Fitri, T. N., M. Fachri Adnan, & Syamsir. (2021). IMPLEMENTASI COLLABORATIVE GOVERNANCE DI INDONESIA. *Ensiklopedia of Journal*, 3(5), 90–97.
- Fitriyani, A. E., Retno Sunu Astuti, & Yuliana Kristanto. (2021). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA MAGELANG. *Journal of Management and Public Policy*, 10(3).
- Gehl, J. (2013). *Cities for people*. Island press.
- Hapsari, S., Rini, E. F., & Rahayu, M. J. (2023). Efektivitas Taman Kota Madiun dalam Memenuhi Kebutuhan Ruang Publik dari Perspektif Pengunjung. *Desa-Kota*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v5i1.64554.15-34>
- Ilmi, I. N., Hani, L., & Wardi, S. (2025). Peran dan Kesesuaian Fungsi Taman Kota The Role and Sustainability of Urban Park Functions. *UPSCALES JOURNAL*, 02(02).
- Kaban, F. H., Ramdani, D., Pariwisata, J., Ekonomi, F., Pariwisata, J., & Ekonomi, F. (2025). *Analisis dampak pariwisata berkelanjutan terhadap masyarakat di sekitar wisata kiara artha park bandung*. 02, 55–61.
- Maghfiroh, H., & Kartini, D. S. (2024). *Desentralisasi dan Komodifikasi Barang Publik : Kajian Marxis atas Komersialisasi Taman Kiara Kota Bandung*. 05(02).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (5th ed.). SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=fjh2DwAAQBAJ>
- Noor, M., Falih Suaedi, & Antun Mardiyanta. (2022). *COLLABORATIVE GOVERNANCE Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik* (M. R. Firdaus & Farid Zaki Yopiannor, Eds.; Pertama). BILDUNG.
- Novita Suratman, F., & Darumurti, A. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (Rthp) Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(2), 102–121. <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i2.12743>
- Oktorina, R., Hapsari, A., & Zulkifli, M. (2025). Transformasi Tata Kelola KPBU dalam Dinamika Pembangunan Wilayah di Indonesia. *AT-TARIIZ: Journal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 227–249. <http://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/attariiz/indexDOI:https://doi.org/10.62668/attariiz.v4i02.1581>
- Pemerintah Kota Bandung. (2017). *Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bandung dengan PT. Mega Chandra Purabuana*. Bagian Kerja Sama Kota Bandung. <https://kerjasama.bandung.go.id/2017/06/22/penandatanganan-nota-kesepahaman-antara-pemerintah-kota-bandung-dengan-pt-pt-mega-chandra-purabuana>
- Pratama, R. A. (2023). *Untuk Siapa Kiara Artha Park Bandung?* Kabar Kampus. <https://kabarkampus.com/2023/06/untuk-siapa-kiara-artha-park-bandung/>
- Rahmasari, F., & Suryani, T. A. (2023). Identifikasi Kondisi Eksisting Kiara Artha Park Kota Bandung. In *FTSP Series*. ITENAS.
- Setiajatnika, E., Gunadi, T., & Nugraha, H. (2023). Skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ). *Coopetition :*

- Jurnal Ilmiah Manajemen*, 14(2), 317–332.
<https://doi.org/10.32670/coopetition.v14i2.3371>
- Sushanti, I. R., Yuniati, S. R., & Angelia, T. (2021). Eksistensi ruang publik menghadapi transformasi penggunaan ruang di permukiman kota. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 16(2), 186. <https://doi.org/10.20961/region.v16i2.47859>
- Wardani, B., & Mutia, A. (2022). Kajian Evaluasi Manfaat Pembangunan Taman Kiara Artha Terhadap Pengunjung dan Pelaku Usaha. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 17. <https://doi.org/10.29313/jpwk.v17i1.593>
- Wicaksono, Z. A., & Karniawati, N. (2023). Implementasi Kebijakan Public Private Partnership (Ppp) Dalam Meningkatkan Infrastruktur Riset Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 28–33. <https://doi.org/10.54895/jipu.v2i2.2039>
- Yuana, D., Rahayu, F., & Apriadi, D. W. (2025). *Antara Ruang Publik dan Komersialisasi : Produksi Ruang dalam Pengembangan RTH Central Park Meikarta*. 14(02), 21–32.
- Yunusova, S. (2022). the Essence of Public-Private Partnership and Its Importance in the Implementation of Infrastructure Projects. *Economics and Education*, 23(1), 17–22. https://doi.org/10.55439/eced/vol23_iss1/a2